

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya budaya populer global sebagai instrumen *soft power* telah membawa paradigma baru dalam melihat keterkaitan antara tubuh, ekspresi, dan identitas diri di ranah domestik. Dalam tatanan dunia yang kian terhubung, individu tidak lagi sekadar mewarisi peran gender yang baku secara tradisional, melainkan secara aktif melakukan negosiasi identitas melalui adopsi tren visual dan gaya hidup lintas batas negara (*transnational lifestyle*). Pergeseran ini menciptakan sebuah ruang transisi di mana identitas menjadi komoditas sosiopolitik yang dinegosiasikan secara terus-menerus, sekaligus menandai runtuhnya dominasi narasi tunggal mengenai norma perilaku yang selama ini mapan di tingkat lokal.

Globalisasi sosial dan budaya telah mengubah cara orang memandang identitas. Penyebaran nilai-nilai global mengenai hak atas ekspresi personal kini menjadi bagian dari diskursus identitas yang melintasi batas-batas kedaulatan budaya nasional. Arus informasi ini membawa kerangka berpikir baru mengenai pluralitas identitas, dimana konsep seperti fluiditas gender mulai diperkenalkan sebagai bagian dari keberagaman ekspresi di ruang publik digital. Interaksi ini memicu negosiasi antara standar perilaku yang telah lama mapan secara domestik dengan narasi identitas kontemporer yang diusung oleh budaya populer dunia.

Proses globalisasi yang didorong oleh teknologi digital telah membuat isu identitas tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara. Internet dan teknologi

digital telah mengkaburkan batasan fisik, sehingga nilai-nilai dari luar negeri dapat masuk dengan mudah ke dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Hal ini menyebabkan standar perilaku yang sudah ada di tingkat lokal mulai berbenturan dengan ide-ide baru yang datang dari dunia internasional. Situasi tersebut akhirnya mendorong munculnya cara-cara baru bagi individu untuk mendefinisikan diri mereka demi mendapatkan pengakuan di mata publik.

Dinamika tersebut kemudian memfasilitasi individu untuk mengadopsi elemen-elemen identitas yang lebih fleksibel sebagai bentuk respons terhadap keterhubungan global. Sesuatu yang dulu dianggap tetap dan hanya mengikuti aturan lokal, kini menjadi sangat dinamis karena pengaruh interaksi lintas negara. Identitas tidak lagi diterima begitu saja, melainkan dibentuk oleh pengaruh nilai-nilai global dan teknologi informasi yang sangat cepat (Azzahra 2025). Hal ini membuat terciptanya ruang transnasional di mana norma-norma gender tidak lagi ditentukan secara eksklusif oleh negara-bangsa. Platform digital seperti *TikTok* atau *Instagram* bertindak sebagai media penyebaran nilai global yang bergesekan dengan hegemoni maskulinitas lokal di Indonesia.

Teknologi digital bertindak sebagai infrastruktur utama globalisasi yang memfasilitasi penyebaran norma global secara lintas batas. Proses transmisi ini membawa prinsip SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, and Sex Characteristics*) sebagai standar baru hak asasi manusia untuk menantang sistem gender biner (Thoreson 2014). Status sebagai standar baru ini berwujud karena kedua instrumen tersebut berhasil mengodifikasi hukum internasional lawas ke dalam panduan universal yang spesifik untuk mengisi kekosongan hukum (*legal*

gap) terkait perlindungan minoritas gender, sekaligus memperoleh legitimasi dari berbagai pakar hukum transnasional dan badan PBB. Didukung oleh industri kreatif, norma kosmopolitanisme mempromosikan keberagaman identitas sebagai simbol modernitas yang mendobrak peran tradisional di tingkat domestik (Duara 2015). Integrasi berbagai norma ini akhirnya membentuk diskursus kesetaraan gender transversal yang mengakui bahwa identitas bersifat cair dan tidak lagi terbatas pada kategori biologis semata (Butler 2004).

Platform media sosial memungkinkan narasi mengenai keberagaman gender dan kebebasan berekspresi menembus ruang domestik. Fenomena pengakuan terhadap berbagai kategori gender di negara lain, seperti Thailand, berfungsi sebagai referensi internasional yang menunjukkan bahwa definisi gender bersifat fleksibel dan tidak selalu terbatas pada sistem biner. Pada perspektif politik identitas transnasional, difusi norma global mengenai keberagaman gender, yang sering kali dipromosikan melalui industri kreatif global serta diskursus kesetaraan yang semakin inklusif di tingkat internasional, telah mengaburkan batasan tradisional mengenai apa artinya menjadi seorang laki-laki.

Perubahan identitas ini menjadi sangat penting dalam perspektif Hubungan Internasional, terutama melalui sudut pandang politik identitas. pada lingkup ini, identitas bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan menjadi arena perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. Politik identitas di sini berarti subjek menggunakan identitas mereka untuk menantang aturan lokal yang bersifat normatif dengan membawa nilai-nilai kekeluargaan yang berlaku secara global. Ketika nilai-nilai

internasional bertemu dengan aturan tradisional di Indonesia, terjadilah resistensi atau gesekan. Di sinilah individu mulai melakukan negosiasi: mereka menggunakan dorongan atau tren global untuk menunjukkan bahwa cara hidup mereka sah, meskipun berbeda dengan standar masyarakat sosial di sekitarnya.

Jejak keberagaman identitas gender dalam tatanan sosial di nusantara secara historis dapat ditemukan pada fragmen kebudayaan tertentu, seperti contoh figur Bissu dalam masyarakat Bugis yang merepresentasikan identitas non-biner dengan posisi sosial-spiritual yang dihormati (Hidayana 2025). Keberadaan entitas lokal ini memberikan preseden bahwa konstruksi gender di tingkat domestik tidak selalu bersifat tunggal, meskipun realitas saat ini justru menunjukkan dominasi maskulinitas yang dominan dan baku. Standar maskulinitas tersebut, mengacu pada pemikiran Michel Foucault (1995), bekerja sebagai alat untuk mendisiplinkan tubuh serta emosi yang menuntun laki-laki untuk selalu tampil dominan dan membatasi ruang bagi ekspresi emosional.

Alur historis mengenai Bissu dan Lengger tersebut dihadirkan bukan untuk menyamakan peran kultural tradisional dengan konsep *gender fluid*, melainkan sebagai bukti empiris bahwa sistem biner bukanlah satu-satunya konstruksi gender yang pernah hidup dalam ruang sosial domestik. Pemaparan ini penting untuk menunjukkan bahwa ruang sosiokultural Indonesia sebenarnya memiliki akar sejarah yang terbuka terhadap keberagaman keberadaan gender sebelum akhirnya mengalami penyeragaman oleh nilai-nilai modern yang kaku. Tatanan masyarakat kontemporer saat ini telah bergeser menjadi sangat heteronormatif, dengan institusi

keluarga sebagai unit utama yang memantau ketat keselarasan perilaku individu berdasarkan standar biner laki-laki dan perempuan. Aturan domestik yang kaku tersebut membatasi ruang bagi kebebasan berekspresi, sehingga standar tradisional yang ada saat ini dianggap tidak lagi cukup untuk mewadahi dinamika identitas generasi muda.

Keterbatasan ruang fisik dalam struktur domestik tersebut membuka jalan bagi masuknya *gender fluid* sebagai sebuah identitas modern transnasional yang diadopsi oleh subjek lokal melalui interaksi global di internet. Masuknya konsep baru ini menjadi sarana bagi generasi muda untuk menemukan kembali ruang keberagaman yang sempat teromandikan oleh struktur sosial konvensional. Perpaduan antara tren visual dari idola global (*mediascape*) dan literasi dari konten edukasi digital (*ideoscape*) kemudian memberikan pembenaran bagi subjek *gender fluid* di Indonesia bahwa identitas mereka adalah hal yang nyata (Appadurai, 1996).

Ruang siber tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pelarian dari diskriminasi di dunia nyata, melainkan telah bermutasi menjadi basis kekuatan baru bagi para aktor non-negara di tingkat lokal. Melalui platform digital lintas batas ini, subjek *gender fluid* dapat membangun solidaritas virtual, mengikis stigma negatif, dan menegosiasikan ekspresi identitas mereka tanpa harus terbentur oleh barikade hukum pemerintah domestik. Pengaruh *soft power* dari budaya populer global inilah yang menjelaskan mengapa ruang digital mampu menyediakan ruang aman dan pengakuan bagi identitas-identitas modern yang sebelumnya terisolasi dalam struktur sosial fisik di Indonesia.

Pada penelitian ini, dinamika ekspresi subjek di ranah digital memperlihatkan variasi taktis yang dinamis dan tidak tunggal. Sebagian subjek terlihat menjalankan dua peran sekaligus, di mana mereka tetap menampilkan performativitas maskulin hegemonik di ruang publik nyata guna memenuhi ekspektasi norma tradisional, namun mengekspresikan identitas yang lebih cair (*gender fluid*) di dunia digital sebagai respons terhadap tuntutan lingkungan yang berbeda.

Sebaliknya, sebagian subjek lainnya memilih untuk melakukan artikulasi identitas secara terbuka (*full come out*) di media sosial publik tanpa menggunakan akun anonim. Penting untuk memperjelas posisi subjek dalam penelitian ini melalui lensa identitas *gender fluid*. Identitas ini merujuk pada ketidakstabilan (*instability*) identitas gender subjek, di mana mereka tidak mengidentifikasi diri secara permanen dalam kotak *biner* laki-laki atau perempuan. Konsekuensinya, baik melalui taktik hibrida dua peran maupun subversi terbuka di media sosial, seluruh subjek ini harus berhadapan dengan aturan masyarakat Indonesia yang dominan, institusional, dan normatif.

Fenomena ini pada dasarnya merepresentasikan tantangan terhadap kontrol nilai yang berusaha dipertahankan oleh struktur sosial domestik. Di saat standar 'maskulinitas nasional' yang dominan terus dipaksakan melalui pengawasan sosial, teknologi informasi justru membuka celah bagi individu untuk mengadopsi identitas transnasional yang lebih cair sebagai bentuk subversi terhadap norma setempat. Ketegangan muncul karena ekspektasi kultural masyarakat Indonesia masih

menuntut laki-laki untuk tampil kuat dan dominan, sementara ruang digital menawarkan kebebasan ekspresi yang melampaui batas-batas tradisi tersebut. Masalah utamanya bukan terletak pada batasan hukum formal, melainkan pada stigma sosial yang mengidentifikasi kelembutan atau atensi pada estetika sebagai anomali, yang kemudian melahirkan label '*less man*' atau kurang kekelaki-lakian bagi mereka yang mencoba keluar dari pakem tradisional (Pamugari 2022)

Laki-laki dengan identitas ini mencari ruang berekspresi yang lebih fleksibel untuk menampilkan sisi emosional, kreatif, dan reflektif tanpa harus meninggalkan jati diri biologis mereka. Pilihan menjadi *gender fluid* bukan merupakan bentuk penolakan terhadap maskulinitas, melainkan upaya untuk mendefinisikan ulang peran laki-laki agar lebih fleksibel dan inklusif (Pamugari 2022). Identitas tersebut memberikan ruang bagi ekspresi diri yang tidak hanya terbatas pada sifat dominan atau tegas. Kelembutan, estetika, dan kerentanan dipandang sebagai bagian yang wajar dalam pengalaman hidup seorang laki-laki.

Dinamika makna gender di tingkat global sering kali berbenturan dengan struktur sosial yang mendominasi di tingkat lokal. Penerimaan terhadap identitas yang cair sangat dipengaruhi oleh norma arus utama yang saat ini cenderung memegang teguh nilai gender biner (Akhiruddin et al 2025, 61-62). Ketegangan muncul ketika standar sosial modern di Indonesia menuntut pakem maskulinitas dominan, yang sering kali tidak sejalan dengan keberagaman ekspresi individu di ruang digital. Akibatnya, subjek yang menampilkan sisi lembut atau estetika sering

kali dianggap menyimpang dari standar ideal maskulinitas sehingga harus menghadapi stigma serta tekanan sosial yang signifikan.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan *gender* merupakan hasil interaksi antara subjek dan struktur sosial. Struktur tersebut memiliki pengaruh dalam memberikan batas maupun peluang bagi keberagaman ekspresi identitas. Hubungan antara keinginan personal untuk berekspresi secara jujur dengan ekspektasi masyarakat terhadap standar maskulinitas memperlihatkan bahwa identitas selalu melibatkan proses negosiasi yang dinamis (Salsabila et al, 25-26). Individu tidak sekadar mengikuti aturan yang ada, melainkan secara aktif mencari celah untuk menyeimbangkan jati diri mereka dengan lingkungan sosialnya.

Resistensi terhadap standar maskulinitas di Indonesia umumnya tidak muncul dalam bentuk konflik terbuka, melainkan melalui praktik keseharian yang secara aktif menantang definisi gender tradisional. Tekanan sosial yang kuat justru memicu munculnya celah bagi individu untuk mengekspresikan sisi emosional, estetika, dan kerentanan sebagai bagian dari identitas mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault mengenai relasi kuasa, di mana tekanan atau pendisiplinan sosial sering kali melahirkan bentuk-bentuk perlawanan halus melalui pilihan gaya hidup yang berbeda dari norma arus utama.

Fenomena ini merupakan upaya meruntuhkan '*Matriks Heteroseksual*' Judith Butler yang selama ini memaksa keselarasan baku antara tubuh laki-laki dan perilaku maskulin, di mana ambiguitas identitas subjek menjadi bukti adanya pendisiplinan tubuh yang bersifat opresif. Dalam kondisi tanpa kuasa untuk

melawan struktur sosial secara frontal, pemanfaatan ruang digital pun bertransformasi menjadi sebuah 'taktik' (De Certeau) bagi subjek untuk melakukan negosiasi identitas: tetap menjalankan performativitas maskulinitas konvensional di dunia fisik demi keamanan sosial, sembari mengekspresikan identitas *gender fluid* secara bebas di dunia digital sebagai ruang identitas yang lepas dari pengawasan norma domestik.

Perbedaan mendasar antara *gender fluid* dan *sexual fluid* terletak pada dimensi identitas yang menjadi objek fleksibilitasnya *gender fluid* berfokus pada identitas diri atau bagaimana individu mendefinisikan jati dirinya sendiri, sedangkan *sexual fluid* merujuk pada dinamika orientasi atau ketertarikan terhadap pihak lain (Njoroge 2021). kedua konsep ini menjadi bagian sentral dalam diskursus *LGBTQ+* karena keduanya secara fundamental menolak prinsip stabilitas identitas yang diwajibkan oleh norma heteronormatif. Fokus pada kelompok *LGBTQ+* muncul karena *fluiditas* ini dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap kategori biner yang baku, di mana individu menuntut pengakuan publik atas identitas yang bersifat non-statis. Dengan demikian, *gender fluid* bukan sekadar perubahan gaya busana, melainkan sebuah pernyataan identitas yang menempatkan subjektivitas individu di atas klasifikasi biologis tradisional.

Urgensi penelitian ini terletak pada fenomena negosiasi identitas dan resistensi yang sering kali terabaikan karena dianggap sekadar tren gaya hidup, padahal merupakan upaya kolektif dalam menantang standar gender normatif. Dalam perspektif Hubungan Internasional, fenomena ini menjadi relevan karena

teknologi digital telah menciptakan celah dalam kedaulatan negara untuk mendisiplinkan perilaku warganya. Di dunia fisik, negara memiliki otoritas penuh untuk menyeragamkan identitas laki-laki sesuai dengan standar maskulinitas nasional melalui pengawasan sosial dan hukum domestik.

Ruang digital yang bersifat lintas batas (transnasional) memutus kendali tersebut, menyediakan area di luar jangkauan pemerintah pusat di mana Subjek dapat mengakses dan mempraktikkan pluralitas nilai gender. Melalui koneksi dengan jaringan informasi global, individu di tingkat lokal memperoleh otonomi untuk mengadopsi identitas *gender fluid* sebagai respons terhadap dominasi *hard masculinity*. Realitas ini membuktikan bahwa teknologi memfasilitasi individu untuk menjadi aktor mandiri yang mampu mengelola identitasnya sendiri dalam titik temu antara nilai lokal dan arus informasi internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masuknya arus informasi global melalui *platform digital* memicu munculnya identitas *gender* alternatif laki-laki *gender fluid* di Indonesia. Fenomena ini membuktikan bahwa standar maskulinitas kini berada dalam polemik yang lebih terbuka, di mana nilai-nilai transnasional mulai bersinggungan dengan aturan gender domestik yang selama ini bersifat dominan. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi ruang alternatif bagi individu untuk mengekspresikan jati diri yang sering kali dibatasi oleh norma sosial dan pengawasan di dunia nyata.

Subjek memiliki celah untuk menampilkan identitas yang lebih fleksibel tanpa harus berhadapan langsung dengan stigma di lingkungan fisik mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya upaya individu untuk mengelola ekspresi diri di tengah dominasi aturan sosial yang baku. Bagi kelompok *LGBTQ+* di Indonesia, ruang digital menjadi medan untuk mengolah identitas yang menantang nilai konservatif sekaligus strategi navigasi guna mempertahankan eksistensi di tengah tekanan standar maskulinitas tradisional. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana eksistensi identitas kelompok *LGBTQ+* *vis a vis* dengan standar maskulinitas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ruang digital sebagai infrastruktur transnasional yang memfasilitasi konstruksi identitas di tengah dominasi standar maskulinitas biner di Indonesia. Secara lebih mendalam, penelitian ini berupaya mendekonstruksi strategi subjek dalam mengelola ekspresi identitas melalui praktik negosiasi antara representasi diri di ruang digital dan tuntutan sosial di ruang fisik guna menghadapi ekspektasi struktur sosial yang konservatif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bermaksud menjelaskan dinamika identitas yang bersifat cair (*gender fluid*) serta mekanisme yang digunakan subjek dalam menyelaraskan jati diri mereka dengan difusi norma global dan eksistensi norma sosial yang berlaku di tingkat domestik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademis dan praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Studi gender Global dalam Hubungan Internasional, khususnya mengenai dinamika maskulinitas yang kini bersinggungan dengan arus nilai global. Dengan memfokuskan kajian pada penggunaan teknologi lintas batas, penelitian ini menawarkan sudut pandang mengenai cara individu melakukan negosiasi identitas di tengah struktur sosial domestik yang cenderung baku. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur mengenai peran teknologi informasi sebagai ruang alternatif yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara norma gender tradisional dengan berbagai perspektif identitas dari dunia internasional

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi praktisi media dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan literasi digital yang inklusif guna meminimalkan stigma sosial. Bagi komunitas *LGBTQ+*, hasil kajian ini berfungsi sebagai basis data advokasi untuk mendorong pemenuhan hak perlindungan dari diskriminasi serta memvalidasi pengalaman kolektif mereka dalam menghadapi tekanan struktur sosial demi kesetaraan HAM. Secara luas, temuan ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai dinamika identitas di era globalisasi agar tercipta lingkungan sosial yang lebih adaptif dan menghargai keragaman ekspresi individu.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan, proposal penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan fondasi penelitian yang meliputi latar belakang mengenai pengaruh globalisasi dan teknologi informasi terhadap pergeseran identitas gender di Indonesia. di dalamnya dibahas ketegangan antara standar maskulinitas patriarki dengan munculnya ekspresi laki-laki *gender fluid*. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah yang memfokuskan pada ruang digital sebagai arena resistensi, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan guna memahami pentingnya penelitian ini dalam kerangka politik identitas.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan literatur relevan mengenai politik identitas di era digital untuk memosisikan kebaruan penelitian. Bagian kerangka Konsep menjelaskan penggunaan pemikiran Michel Foucault mengenai relasi kuasa untuk membedah bagaimana standar maskulinitas mendisiplinkan tubuh individu, serta konsep Michel de Certeau mengenai *Tactics* untuk menganalisis cara individu mengakali aturan sosial melalui ruang digital. Selain itu, bab ini

menjelaskan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data.

BAB III GEOGRAFI TUBUH: MEMETAKAN JEJAK GLOBALISASI DAN ARSITEKTUR PATRIARKI INDONESIA

Bab ini menganalisis struktur sosial di Indonesia yang membentuk standar maskulinitas tradisional. Pembahasan dimulai dari sejarah keberagaman gender lokal, mulai dari era kolonial hingga saat ini. Selanjutnya, bab ini membedah bagaimana institusi keluarga dan masyarakat melakukan *policing masculinity* dan pendisiplinan tubuh. Selanjutnya, bab ini memetakan bagaimana ruang digital bertindak sebagai jalur masuknya nilai-nilai transnasional yang memperkenalkan wacana identitas gender yang lebih cair ke dalam ruang domestik.

BAB IV EKSISTENSI *GENDER FLUID*: NEGOSIASI IDENTITAS *LGBTQ+* DALAM BAYANG-BAYANG MASKULINITAS INDONESIA

Bab ini merupakan inti analisis yang membedah agensi dan praktik performatif subjek di tengah ketimpangan kuasa. bab ini membedah variasi taktik gerilya yang digunakan subjek untuk menghindari stigma dunia nyata: mulai dari taktik "dua peran" (patuh pada tuntutan fisik maskulin di dunia nyata sekaligus mengekspresikan diri secara cair di TikTok) hingga evolusi taktik menuju artikulasi

terbuka (*full come out*) memanfaatkan celah fitur dan algoritma media sosial.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil analisis serta memberikan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini menguraikan implikasi temuan terhadap studi Hubungan Internasional, khususnya dalam melihat bagaimana interaksi lintas batas di ruang digital memperlemah kendali struktur sosial nasional terhadap identitas individu, serta memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.

